

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka menjelaskan beberapa teori, hasil penelitian terdahulu, dan publikasi umum yang *relevan* dengan variabel-variabel penelitian. Adapun kajian pustaka yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Sistem Informasi Akuntansi

2.1.1.1 Definisi Sistem Informasi Akuntansi

Informasi sangat berperan dalam segala aspek kehidupan manusia baik secara individu maupun secara organisasi. Semakin baik kualitas informasi dimiliki oleh suatu organisasi maka semakin baik pula komunikasi yang terjadi didalamnya. Informasi berkualitas akan meningkatkan kualitas pemahaman para pengelola organisasi dalam melihat perubahan yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi. Melihat pentingnya informasi yang begitu tinggi maka organisasi menjadi sangat tergantung pada sistem informasi akuntansi. Informasi akuntansi akan menghasilkan laporan keuangan yang berguna bagi pihak internal dan pihak eksternal khususnya untuk pengambilan keputusan.

Pada instansi pemerintah informasi akuntansi sangat bermanfaat bagi internal meliputi pemerintahan itu sendiri seperti bendahara, kepala seksi, kepala

bidang dan kepala dinas, sedangkan pihak eksternal meliputi inspektorat, BPK dan Bank. Fungsi utama sistem informasi akuntansi adalah untuk mendorong seoptimal mungkin agar akuntansi dapat menghasilkan berbagai informasi akuntansi yang terstruktur dan berkualitas yaitu tepat waktu, relevan, lengkap dan akurat.

Definisi sistem informasi akuntansi yang dikemukakan oleh Romney dan Steinbart (2015:30) adalah sebagai berikut :

“An Accounting Information System (AIS) is a system than collects, record, stores, and processes data to produce information for decision makers.”

Definisi sistem informasi akuntansi menurut Susanto (2017:80) yaitu:

“Sistem informasi akuntansi dapat didefinisikan sebagai kumpulan (integrasi) dari sub sistem/komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan.”

Definisi sistem informasi akuntansi menurut Puspitawati dan Dewi (2011:58) yaitu:

“Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mentransformasi data akuntansi menjadi informasi yang mencakup siklus pemrosesan transaksi, pengguna teknologi informasi dan pengembangan sistem informasi.”

Menurut Tawaqal (2017) Sistem informasi akuntansi merupakan suatu komponen atau sub sistem dari suatu organisasi yang mempunyai tanggung jawab

atas penyiapan informasi keuangan guna membantu manajemen dalam pembuatan keputusan.

Menurut Juwita (2013) Sistem Informasi Akuntansi memiliki peran yaitu Sistem Informasi Akuntansi berperan dalam pengendalian keputusan.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah kumpulan dari suatu sumber daya yang terdiri dari *hardware* (perangkat keras), *software* (perangkat lunak), dan *brainware* (sumber daya manusia), yang menjalankan kegiatan berdasarkan prosedur untuk mengolah data yang di tunjang dengan *database* dan jaringan komunikasi untuk menghasilkan suatu informasi berbentuk laporan keuangan.

2.1.1.2 Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi

Seperti yang dikemukakan oleh Midjan (2001:28) mengenai sistem informasi akuntansi maka dapat diketahui bahwa sistem informasi akuntansi memiliki karakteristik yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan (*usefulness*)
2. Ekonomis (*economy*)
3. Keandalan (*reliability*)
4. Kapasitas (*capacity*)
5. Kesederhanaan (*simplicity*)
6. Fleksibilitas (*flexibility*)

Adapun penjelasan mengenai karakteristik sistem informasi akuntansi sebagai berikut :

1. Kegunaan (*usefulness*)

Kegunaan (*usefulness*) yaitu suatu sistem harus dapat menghasilkan informasi yang tepat waktu, *relevan* dengan pengambilan keputusan yang dibuat oleh manajemen serta pelaksanaan operasi pegawai.

2. Ekonomis (*economy*)

Ekonomis (*economy*) yaitu seluruh kegiatan dari sistem termasuk laporan, pengendalian serta alat – alat harus memberikan kontribusi nilai keuntungan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan.

3. Keandalan (*reliability*)

Keandalan (*reliability*) yaitu hasil keluaran (*output*) dari sistem informasi tersebut harus mempunyai tingkat kegunaan yang tinggi dan sistem tersebut harus dapat beroperasi secara efektif.

4. Kapasitas (*capacity*)

Kapasitas (*capacity*) yaitu kapasitas dari suatu sistem harus cukup untuk dapat menangani saat-saat dimana aktivitas operasi mengalami kenaikan, sebagaimana halnya pada saat aktivitas operasi berada dalam keadaan normal.

5. Kesederhanaan (*simplicity*)

Kesederhanaan (*simplicity*) yaitu suatu sistem harus dirancang dengan cukup sederhana sehingga struktur dan operasinya dapat dengan mudah dimengerti serta prosedurnya mudah untuk dilaksanakan.

6. Fleksibilitas (*flexibility*)

Fleksibilitas (*flexibility*) yaitu suatu sistem harus cukup fleksibel dalam menghadapi perubahan yang terjadi sebagai akibat dari adanya kondisi yang berubah ataupun adanya keperluan lain dalam organisasi.

2.1.1.3 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Dalam memenuhi kebutuhan informasi baik untuk kebutuhan pihak internal maupun pihak eksternal, sistem informasi harus didesain sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsinya. Demikian pula suatu sistem informasi akuntansi dalam memenuhi fungsinya harus mempunyai tujuan-tujuan yang dapat memberikan pedoman kepada pihak-pihak yang terkait dalam melakukan tugasnya sehingga dapat menghasilkan informasi-informasi yang berguna, terutama dalam menunjang perencanaan dan pengendalian.

Menurut Susanto (2017:8), tujuan sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut:

“Bagi suatu perusahaan, sistem informasi akuntansi dibangun dengan tujuan utama untuk mengolah data keuangan yang berasal dari berbagai macam sumber menjadi informasi akuntansi yang diperlukan oleh berbagai macam penilaian. Pemakai informasi tersebut dapat berasal dari dalam perusahaan seperti manajer atau dari luar seperti pelanggan dan pemasok.”

Adapun tujuan penyusunan sistem informasi akuntansi menurut Mardi (2011:4) yaitu:

1. *(to fulfill obligations relating to stewardship)*
2. *(to support decision making by internal decision makers).*
3. *(to support the day to day operations).*

Adapun penjelasan mengenai tujuan sistem informasi akuntansi sebagai berikut :

1. *(to fulfill obligations relating to stewardship)*

(to fulfill obligations relating to stewardship) yaitu pengelolaan selalu mengacu kepada tanggung jawab manajemen guna menata secara jelas segala sesuatu yang berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki. Keberadaan sistem membantu ketersediaan informasi yang dibutuhkan oleh pihak eksternal melalui laporan keuangan tradisional dan laporan yang diminta lainnya, demikian pula ketersediaan laporan internal yang dibutuhkan oleh seluruh jajaran dalam bentuk laporan pertanggungjawaban pengelolaan.

2. *(to support decision making by internal decision makers)* yaitu sistem informasi menyediakan informasi guna mendukung setiap keputusan yang diambil oleh pimpinan sesuai dengan pertanggungjawaban yang ditetapkan.
3. *(to support the day to day operations)* yaitu sistem informasi ini menyediakan informasi bagi setiap satuan tugas dalam berbagai level manajemen, sehingga dapat lebih produktif.

Menurut Juwita (2013) sistem Informasi yang bertujuan menghasilkan informasi keuangan disebut dengan Sistem Informasi Akuntansi, hal ini berlaku baik untuk organisasi bisnis maupun organisasi sektor publik seperti di Pemerintah Daerah.

Dari uraian-uraian tujuan sistem informasi akuntansi di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi bertujuan untuk menyimpan dan mengumpulkan data yang digunakan untuk menghasilkan informasi berupa laporan keuangan yang dibutuhkan oleh pihak internal dan pihak eksternal untuk mendukung pengambilan keputusan.

2.1.1.4 Pengguna Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi memberikan manfaat bagi penggunanya baik pengguna internal maupun pengguna eksternal sesuai dengan harapan dan kebutuhannya. Menurut Mardi (2011:11) menyebutkan pihak-pihak yang memanfaatkan sistem informasi akuntansi perusahaan terdiri dari:

1. Pihak manajemen tingkat atas.
2. Pihak manajemen tingkat bawah.

Adapun penjelasan mengenai pihak-pihak yang memanfaatkan sistem informasi akuntansi perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Pihak manajemen tingkat atas yaitu kelompok ini terdiri para manajer yang dalam kapasitasnya di perusahaan memerlukan informasi sesuai bentuk tugas dan tanggung jawabnya, mereka membuat keputusan berdasarkan data dan informasi yang dihasilkan oleh SIA. Apabila informasi yang mereka peroleh dapat menunjang tugasnya, maka kinerja perusahaan akan meningkat.
2. Pihak manajemen tingkat bawah yaitu meliputi pihak manajemen ditiap tingkat dalam perusahaan, serta personel operasional. Berdasarkan pada apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Para desainer sistem,

termasuk para akuntan, harus menyeimbangkan keinginan berbagai pengguna internal dengan sisi hukum dan ekonomi seperti pengendalian dan keamanan yang memadai, akuntabilitas yang memadai, dan biaya untuk menyediakan berbagai bentuk alternatif informasi.

Dapat disimpulkan bahwa pengguna sistem informasi akuntansi terdiri dari pengguna internal dan eksternal. Pengguna internal dalam pemerintahan meliputi bendahara, kepala seksi, kepala bidang dan kepala dinas, sedangkan pengguna eksternal meliputi inspektorat, BPK dan Bank. Sistem informasi akuntansi harus memberikan nilai atau manfaat yang berdasarkan pada harapan atau kebutuhan para pengguna internal instansi pemerintahan maupun pihak eksternal.

2.1.1.5 Unsur - unsur Sistem Informasi Akuntansi

Unsur - unsur/ komponen sistem informasi akuntansi menurut Susanto (2017:207-309) yaitu:

1. *Hardware* (Perangkat Keras)
2. *Software* (Perangkat Lunak)
3. *Brainware* (Sumber Daya Manusia)
4. Prosedur
5. *Database*
6. Jaringan Komunikasi

Adapun penjelasan mengenai unsur-unsur/komponen sistem informasi akuntansi sebagai berikut :

1. *Hardware* (Perangkat Keras), merupakan salah satu komponen dari sistem informasi akuntansi yang merupakan peralatan fisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan dan mengeluarkan hasil pengolahan data bentuk informasi.

2. *Software* (Perangkat Lunak), merupakan kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer, sedangkan program merupakan kumpulan dari perintah-perintah komputer yang tersusun secara sistematis. *Software* dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu perangkat lunak sistem (*system software*) dan perangkat lunak aplikasi (*application software*).
3. *Brainware* atau sumber daya manusia (SDM) merupakan bagian terpenting dari komponen sistem informasi dalam dunia bisnis yang dikenal sebagai sistem informasi akuntansi. Komponen SDM ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan komponen lainnya didalam suatu sistem informasi sebagai hasil dari perencanaan, analisis, perancangan, dan strategi implementasi yang didasarkan kepada komunikasi diantara sumber daya manusia yang terlibat dalam suatu organisasi.
4. Prosedur merupakan rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Sedangkan aktivitas pada dasarnya melakukan suatu kegiatan berdasarkan informasi yang masuk dan persepsi yang dimiliki tentang informasi.
5. *Database* merupakan kumpulan data-data yang tersimpan didalam media penyimpanan di suatu perusahaan (arti luas) atau didalam komputer (arti sempit).
6. Teknologi Jaringan Komunikasi (*Communication Network Technology*) Telekomunikasi atau komunikasi data dapat didefinisikan sebagai penggunaan media elektronik untuk memindahkan data atau informasi dari suatu lokasi ke satu atau beberapa lokasi lain yang berbeda. Komunikasi yang terjadi diantara beberapa pihak yang berkomunikasi harus difasilitasi dengan infrastruktur berupa jaringan telekomunikasi yang konfigurasiya bisa berbentuk bintang (*star*), cincin (*ring*), dan hirarki (BUS). Jadi dengan menguasai jaringan telekomunikasi telah menolong persoalan yang disebabkan oleh masalah geografi dan waktu sehingga memungkinkan organisasi untuk mempercepat produksi dan pengambilan keputusan.

Dengan demikian dalam membentuk suatu sistem informasi akuntansi dibutuhkan *hardware*, *software*, dan *brainware* yang memadai dan berpedoman pada prosedur-prosedur didukung oleh *database* dan jaringan komunikasi, tanpa itu semua sistem tidak akan berjalan dengan baik.

2.1.2 Pengendalian Internal Pemerintah

2.1.2.1 Pengertian Pengendalian Internal Pemerintah

Pengawasan internal Pemerintah merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian internal yang memiliki fungsi melakukan penelitian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan internal mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, audit, pelaporan, dan telaah sejawat.

Adapun definisi dari Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sebagai berikut:

“Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, yang kemudian disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.”

Definisi sistem pengendalian internal menurut Mulyadi (2013:164)

“Pengertian pengendalian intern menurut Mulyadi adalah meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan kenadalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.”

Definisi pengendalian internal menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organizations*) (2013:95)

“Pengertian pengendalian intern menurut COSO adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui: efisiensi dan efektifitas operasi, penyajian

laporan keuangan uang dapat dipercaya, ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku.”

Definisi pengendalian internal menurut armel (2017) yaitu :

“Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu.”

Definisi pengendalian internal pemerintah menurut husna (2017) yaitu :

“Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pengendalian intern didefinisikan merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*).”

Definisi pengendalian internal menurut rokhlinasari (2016) yaitu :

“Sistem pengendalian internal merupakan salah satu sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan.”

Definisi pengendalian internal menurut putri (2015) yaitu :

“Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*).”

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk membangun suatu lingkungan pengendalian yang baik dengan cara menilai resiko-resiko yang kemungkinan akan terjadi, lalu dibuat aktifitas pengendaliannya atau mitigasi risiko, kemudian di informasikan dan dikomunikasikan secara berkelanjutan guna mengevaluasi dengan cara pengawasan.

2.1.2.2 Tujuan Pengendalian Internal Pemerintah

Tujuan pengendalian internal pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pasal 2 ayat (3), yaitu:

“Untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi terciptanya:

1. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintah Negara.
2. Keandalan laporan keuangan.
3. Pengamanan aset negara.
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

2.1.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan SPIP

Pencapaian tujuan dari suatu sistem tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi terutama faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Keberhasilan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor keberhasilan tersebut.

Menurut Wibisono (2010) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), yaitu:

1. “Sumber Daya Manusia
2. Komitmen
3. Keteladanan Pimpinan
4. Ketersediaan Infrastruktur.”

Berikut penjelasan beberapa faktor di atas, yaitu:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan sumber utama dan penggerak dalam suatu organisasi, dan merupakan *soft control* dalam penerapan SPIP.

Sumber daya manusia yang dimaksudkan adalah sumber daya manusia yang memiliki integritas dan menaati etika adalah merupakan komponen penting dalam mendorong agar organisasi dapat berjalan pada jalurnya.

2. Komitmen

Keberhasilan dan kunci sukses tercapainya tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh komitmen dari seluruh pimpinan dan pegawai dalam menjalankan organisasi. Dalam penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, komitmen pimpinan sangat diharapkan sehingga apapun keputusan maupun kebijakan yang akan diambil terkait dengan perbaikan terhadap pengendalian internal prosedur, dan aturan yang akan dilaksanakan mendapat dukungan sepenuhnya dari pimpinan.

3. Keteladanan Pimpinan

Lingkungan pekerjaan sangat mempengaruhi pembentukan karakter dan budaya kerja dalam suatu organisasi. Dalam suatu kondisi lingkungan yang kondusif, dengan pimpinan yang selalu memberikan contoh perilaku yang positif, selalu mendorong bawahannya untuk terbiasa bersikap terbuka, jujur, dan disiplin akan memudahkan organisasi dalam pencapaian tujuannya. Keteladanan pimpinan dalam bersikap dan bertingkah laku akan dapat mendorong terciptanya budaya kerja yang selalu mengedepankan nilai-nilai kejujuran, etika, dan disiplin.

4. Ketersediaan Infrastruktur

Keberadaan infrastruktur mencakup antara lain pedoman, kebijakan, dan prosedur yang terintegritas dengan unsur-unsur SPIP lainnya, sesuai dengan proses bisnis dan karakteristik suatu instansi pemerintah terkait dengan penyelenggaraan SPIP. Keberadaan infrastruktur harus didukung oleh implementasi dan infrastruktur SPIP tersebut.

Berdasarkan paparan di atas faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan SPIP terdiri dari sumber daya manusia yang memiliki integritas, adanya komitmen dari seluruh komponen organisasi, keteladanan pimpinan dan ditunjang dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai.

2.1.2.4 Unsur-Unsur Pengendalian Internal Pemerintah

Dalam penerapan pengendalian internal Pemerintah terdapat unsur-unsur yang harus diterapkan untuk mencapai tujuan sistem pengendalian internal Pemerintah. Menurut Tungal (2014:3), *Committee of Sponsoring Organizations of The Treatway Commission* (COSO) memperkenalkan adanya lima unsur pengendalian yang meliputi:

1. “Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Aktivitas Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Aktivitas Pengawasan.”

Menurut (Gondodiyoto 2007:281) menyebutkan ada empat domain dalam pengendalian intern, meliputi:

1. *“Planning and Organization* (Perencanaan dan Organisasi)
2. *Acquisition and Implementation* (Perolehan dan implementasi)
3. *Delivery and Support* (Penyerahan dan Pendukungan)
4. *Monitoring* (Pemantauan).”

Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada unsur sistem pengendalian internal menurut COSO atau PP No. 60 Tahun 2008, karena pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan sistem pengendalian internal mengacu pada PP No. 60 Tahun 2008.

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008, unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal dalam Pemerintah mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Internal yang tidak dipraktikkan di lingkungan pemerintah di berbagai negara yang diadopsi dari COSO. Penerapan unsur ini dilaksanakan dengan maksud untuk menyatukan dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah yang meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya.

Ada beberapa indikator dari lingkungan pengendalian, diantaranya:

- a. Komitmen nilai integritas dan nilai etika.

Adapun pengertian komitmen nilai integritas dan nilai etika adalah menuntut kekuatan pikiran dan perasaan setiap orang untuk mampu

membedakan antara yang benar dengan salah atau antara yang baik dengan buruk yang akan menjadi ukuran sikap, perilaku, kepribadian dalam kedudukannya sebagai pegawai yang berkewajiban dalam melaksanakan tugas pemerintahan, negara, dan melayani masyarakat dengan jujur, bermoral tinggi, menepati janji, menjaga nama baiknya, dan mampu bersinergi.

- b. Independensi dan fungsi pengawasan terhadap pengembangan dan kinerja pengendalian internal.

Adapun pengertian independensi merupakan suatu keadaan atau posisi dimana kita tidak terikat dengan pihakmanapun. Artinya keberadaan kita adalah mandiri. tidak mengusung kepentingan pihak tertentu atau organisasi tertentu.

- c. Penetapan pengawasan dewan, struktur, pihak berwenang dalam mencapai tujuan dan jalur pelaporan.
- d. Komitmen menarik, mengembangkan, mempertahankan individu yang berkompeten.

2. Penilaian Risiko

Dalam rangka penilaian risiko, Instansi Pemerintah dapat menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Ada beberapa indikator dari penilaian risiko, diantaranya:

- a. Menetapkan tujuan dalam identifikasi dan penilaian risiko.
- b. Identifikasi risiko terhadap pencapaian tujuan.

- c. Menilai risiko potensi penipuan.
- d. Mengidentifikasi dan menilai perubahan yang dapat mempengaruhi SPI.

3. Aktivitas Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuranm kompleksitas, dari sifat dan tugas dan fungsi yang bersangkutan. Ada beberapa indikator dari aktivitas pengendalian, diantaranya:

- a. Memilih dan mengembangkan pengendalian atas mitigasi/usaha pencegahan risiko terhadap pencapaian tujuan.
- b. Pengembangan pengendalian atas teknologi terhadap pencapaian tujuan.
- c. Pengendalian melalui kebijakan yang diterapkan.

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Ada beberapa indikator dari informasi dan komunikasi, diantaranya:

- a. Mengkomunikasikan informasi untuk mendukung pengendalian internal.
- b. Seringnya komunikasi dengan pihak eksternal.

5. Aktivitas Pengawasan

Pimpinan Instansi Pemerintah melakukan proses penilaian terhadap kualitas kinerja sistem pengendalian internal sepanjang waktu. Ada beberapa indikator dari pemantauan, diantaranya:

- a. Memilih, mengembangkan, dan melakukan evaluasi berkelanjutan.
- b. Melakukan evaluasi dan komunikasi di waktu tertentu.

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur *financial* yang merupakan cerminan hasil aktivitas tertentu. Istilah “Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” meliputi semua laporan berbagai penjelasannya mangakui laporannya tersebut akan diakui sebagai bagian dari laporan keuangan. Laporan keuangan daerah merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pada dasarnya laporan keuangan pemerintah daerah adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercaya kepadanya. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan,

mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Agar informasi tersebut dapat mendukung dalam pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai, maka informasi akuntansi harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan. Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik, apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhann pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang disajikan oleh suatu entitas pelaporan. Kualitas laporan keuangan daerah yang disajikan harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan menampilkan suatu kualitas yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan.

Menurut Mahmudi (2016:13) mendefinisikan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Informasi yang disajikan untuk membantu *stakeholder* dalam membuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas.”

Menurut Rosdianto (2013:21) mendefinisikan laporan keuangan didefinisikan sebagai berikut:

“Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu proses dari pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan”

Menurut Kasmir (2012:45) mendefinisikan Laporan keuangan adalah:

“Laporan yang menunjukkan kondisi keuangan entitas pada periode tertentu laporan keuangan juga menentukan langkah apa yang dilakukan perusahaan atau instansi sekarang dan kedepan dengan melihat persoalan yang ada baik kelemahan maupun kekuatan guna mengambil keputusan ekonomi”.

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 mendefinisikan laporan keuangan sebagai berikut:

“Laporan Keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”.

Menurut Bastian (2010:9), pengertian dari kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

“Kualitas laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna dan berkualitas untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.”

Setyautama (2008), mengemukakan bahwa kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

“Kualitas laporan keuangan adalah idealnya laporan keuangan harusnya mencerminkan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Informasinya harus berguna untuk menilai masa lalu dan masa yang akan datang. Semakin tajam dan semakin jelas gambaran yang disajikan lewat data financial, dan semakin mendekati kebenaran.”

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menghasilkan informasi akuntansi bagi para pihak yang berkepentingan sebagai alat pengambilan keputusan, pelaporan keuangan ini disusun untuk menyediakan informasi yang relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami Mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh seluruh entitas pelaporan selama satu periode.

2.1.3.2 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi (2016:11) pemerintah daerah harus terus berupaya memperbaiki kualitas laporannya. Laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah dinilai berkualitas apabila memenuhi ciri-ciri berikut:

- a. Relevan
- b. Andal
- c. Dapat diperbandingkan
- d. Dapat dipahami

Adapun penjelasan mengenai karakteristik laporan keuangan sebagai berikut :

1. Relevan.

Relevan artinya informasi dalam laporan keuangan yang disajikan memberikan manfaat seperti bisa melihat kinerja setiap SKPD Kabupaten Bandung Barat, dengan begitu para pengguna dapat mengambil keputusan dengan baik. Relevansi laporan keuangan terkait dengan:

- a. Laporan keuangan dapat memberikan manfaat untuk memprediksi (*prediktive value*), yaitu memprediksi kondisi keuangan, kebutuhan keuangan, dan kinerja di masa datang.
- b. Laporan keuangan dapat memberikan manfaat untuk evaluasi kinerja masa lalu dan memberikan umpan balik dalam rangka perencanaan keuangan dan perbaikan kinerja di masa datang (*feedback value*).
- c. Laporan keuangan dipublikasikan tepat waktu (*timeliness*) atau 3 bulan setelah akhir tahun buku. Laporan keuangan yang baik harus disajikan tepat waktu, sebab nilai atau manfaat suatu informasi akan berkurang jika terlambat disampaikan.

2. Andal (*Reliability*).

Andal artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat diandalkan, tidak menyesatkan dan mengandung unsur manipulasi.

Laporan keuangan yang andal memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Disajikan secara jujur (*faithfulness of presentation*), yaitu laporan keuangan terbebas dari salah saji material dan tidak ada manipulasi laporan keuangan.

- b. Dapat diverifikasi (*verifiability*), yaitu informasi dalam laporan keuangan dapat diverifikasi kebenarannya melalui proses audit laporan keuangan.
- c. Netral dalam penyajian (*neutrality*), yaitu penyajian laporan keuangan tidak bersifat tendensius dan bias terhadap kepentingan kelompok tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan

lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.3.3 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Halim (2013:44) menyatakan bahwa setelah berlakunya Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah daerah selambat-lambatnya tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut:

1. “Pelaporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*)
 - a. Laporan realisasi anggaran (LRA)
 - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih (Laporan Perubahan SAL)
2. Pelaporan finansial (*financial reports*)
 - a. Neraca
 - b. Laporan operasional (LO)
 - c. Laporan arus kas (LAK)
 - d. Laporan perubahan ekuitas (LPE)
3. Catatan atas laporan keuangan (CaLK)”

Penjelasan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran

kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo

awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/ menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

2.1.3.4 Peranan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keangan disusun untuk menyediakan informasi yang *relevan* mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan

untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasinal pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan peraturan pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintah (SAP) setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang

dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan.

4. Keseimbangan Antar-Generasi (*intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

2.1.3.5 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Secara umum, tujuan laporan keuangan pemerintah daerah adalah menyajikan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara khusus, tujuan laporan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan hal berikut.

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah menandai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim, agar pihak perusahaan, manajemen, dapat mengambil keputusan dari laporan dan pihak-pihak yang memakai informasi agar laporan keuangan tersebut tidak menyesatkan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi keuangan

mengenai suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pertimbangan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu mengenai pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, yang penulis jadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Siti Chodijah, Dan Nurul Hidayah (2018)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Skpd Provinsi Dki Jakarta)	Variabel Indevenđen : Sistem Pengendalian Internal Variabel Dependen : Kualitas Laporan Keuangan	Variabel Indevenđen : Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Sektor Penelitian : Skpd Provinsi Dki Jakarta	Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2.	Irzal Tawakal, Suparno (2017)	Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Kota Banda Aceh	Variabel Indevenđen : Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal Variabel Dependen : Kualitas Laporan Keuangan	Variabel Indevenđen : Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Penelitian: Dilakukan Pada Pemerintah Kota Banda Aceh	Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Di Kota Banda Aceh.
3.	Raja Yoga Gustika Armel	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan	Variabel Indevenđen : Sistem Pengendalian Internal	Variabel Indevenđen : Kompetensi Sumber Daya Manusia,	Kompetensi SDM, Penerapan standar akuntansi pemerintah,

	(2017)	Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai)	Variabel Dependen : Kualitas Laporan Keuangan	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi Sektor Penelitian : Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai	Pemanfaatan teknologi informasi, Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
4.	Desmaria Puji Kesuma, ChoirulAnwar, Darmansyah (2017)	Pengaruh Good Governance, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada Satuan Kerjakementerian Pariwisata	Variabel Indeveniden : Sistem Pengendalian Internal Variabel Dependen : Kualitas Laporan Keuangan	Variabel Indeveniden : Pengaruh Good Governance, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Sektor Penelitian : Pemerintah Pada Satuan Kerjakementerian Pariwisata	Variabel Good Governance, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Secara Simultan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
5.	Tissa Nurul Husna (2017)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Dan Peran Inspektorat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Kota Pekanbaru)	Variabel Indeveniden : Sistem Pengendalian Internal Variabel Dependen : Kualitas Laporan Keuangan	Variabel Indeveniden : Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd), Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Peran Inspektorat Sektor Penelitian : Skpd Kota Pekanbaru	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Dan Peran Inspektorat Terbukti Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
6.	Franta Eveline (2016)	Pengaruh Sap Berbasis Akrua, Sistem Informasi Akuntansi, Kualitas Sdm, Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Variabel Indeveniden : Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal Variabel Dependen : Kualitas Laporan Keuangan	Variabel Indeveniden : Sap Berbasis Akrua, Kualitas Sdm, Dan Komitmen Organisasi Sektor Penelitian : Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Terbukti Berpengaruh Pada Kualitas Laporan Keuangan, Sedangkan Kualitas SDM Terbukti Tidak Berpegaruh Terhadap Kualitas

					Laporan Keuangan.
7.	Ismail dan Neo Agustina (2016)	Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Dpkkd Kabupaten Aceh Utara)	Variabel Indeven : Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Variabel Dependen : Kualitas Laporan Keuangan	Sektor Penelitian : Dpkkd Kabupaten Aceh Utara	Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara
8.	Harnoni (2016)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Skpd Di Kabupaten Kepulauan Anambas)	Variabel Indeven : Sistem Pengendalian Internal Variabel Dependen : Kualitas Laporan Keuangan	Variabel Indeven : Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Sektor Penelitian : Skpd Di Kabupaten Kepulauan Anambas	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Dan Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Positif Signifikan Sedangkan Pemanfaatan Teknologi Informasi Tidak Berpengaruh Signifikan.
9.	Sri Rokhlinasari dan Adi Hidayat (2016)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Bank Bjb Syariah Cirebon	Variabel Indeven : Sistem Pengendalian Internal Variabel Dependen : Kualitas Laporan Keuangan	Sektor Penelitian : Bank Bjb Syariah Cirebon	Berdasarkan Hasil Penelitian Dan Pengujian Hipotesis Bahwa Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
10.	Ramdany (2015)	Variabel Indeven : <i>Influence The Quality of Accounting Information Systems and The Effectiveness of Internal Control</i> Variabel Dependen : <i>Financial Reporting Quality</i>	Variabel Indeven : <i>Influence The Quality of Accounting Information Systems and The Effectiveness of Internal Control</i> Variabel Dependen : <i>Financial Reporting Quality</i>		<i>Accounting information system quality and effectiveness of internal control effects on the quality of financial reporting.</i>
11.	Berry Wan Saputra (2015)	Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Skpd Kota Pekanbaru)	Variabel Indeven : Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Variabel Dependen : Kualitas Laporan Keuangan	Variabel Indeven : Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Sektor Penelitian : Dilakukan Pada Skpd Kota Pekanbaru	Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Sedangkan Sistem Informasi Akuntansi Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
12.	T. Asri	Pengaruh Penerapan	Variabel Indeven :	Variabel Indeven :	Hasil Pengujian

	Yunita (2015)	Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Skpd Kota Dumai)	Sistem Pengendalian Internal Variabel Dependen : Kualitas Laporan Keuangan	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Dan Kompetensi Staf Akuntansi Sektor Penelitian : Dilakukan Pada Skpd Kota Dumai	Hipotesis Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal Dan Kompetensi Staf Akuntansi Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
13.	Ni Ketut Rusmiadi Putri, Nyoman Ari Surya Darmawan, Desak Nyoman Sri Werastuti (2015)	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kecamatan Buleleng)	Variabel Indevenđen : Sistem Pengendalian Internal Variabel Dependen : Kualitas Laporan Keuangan	Variabel Indevenđen : Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Penelitian : Koperasi Simpan Pinjam Di Kecamatan Buleleng	Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Koperasi.
14.	Silviana (2014)	Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Survey Pada Pemerintah Kabupaten Di Seluruh Jawa Barat	Variabel Indevenđen : Sistem Informasi Akuntansi Variabel Dependen : Kualitas Laporan Keuangan	Sektor Penelitian : Dilakukan Pada Pemerintah Kabupaten Seluruh Jawa Barat	Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
15.	As Syifa Nurillah (2014)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Kota Depok)	Variabel Indevenđen : Sistem Pengendalian Internal Variabel Dependen : Kualitas Laporan Keuangan	Variabel Indevenđen : Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sektor Penelitian : Dilakukan Pada Skpd Kota Depok	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memiliki efek positif yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
16.	Desy Sefri Yensi, H. Amir Hasan dan Yuneita Anisma (2014)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Intern (Internal Audit) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada	Variabel Indevenđen : Sistem Pengendalian Internal Variabel Dependen : Kualitas Laporan Keuangan	Variabel Indevenđen : Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem akuntansi Keuangan Sektor Penelitian : SKPD Kabupaten Kuantan Singingi	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, menunjukkan Pengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Sedangkan Sistem Pengendalian Intern (Internal Audit) Tidak Berpengaruh Signifikan

		SKPD Kabupaten Kuantan Singingi)			Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
17.	Ni Luh Nyoman Ari Udiyanti, Anantawikrama Tungga Atmadja, Nyoman Ari Surya Darmawan (2014)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Skpd Kabupaten Buleleng)	Variabel Independen : Sistem Pengendalian Internal Variabel Dependen : Kualitas Laporan Keuangan	Variabel Independen : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Staf Akuntansi Sektor Penelitian : Pada Skpd Kabupaten Buleleng	Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Staf Akuntansi Secara Simultan Memiliki Pengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
18.	Ni Putu Yogi Merta Maeka Sari, I Made Pradana Adiputra, Edy Sujana (2014)	Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (Sap) Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas-Dinas Di Pemerintah Kabupaten Jembrana)	Variabel Independen : Sistem Informasi Akuntansi Variabel Dependen : Kualitas Laporan Keuangan	Variabel Independen : Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (Sap) Sektor Penelitian : Dinas-Dinas Di Pemerintah Kabupaten Jembrana	Secara Simultan Terdapat Pengaruh Yang Positif Dan Signifikan Antara Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
19.	Meilani Purwanti, Wasman (2014)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Bandung)	Variabel Independen : Sistem Informasi Akuntansi Variabel Dependen : Kualitas Laporan Keuangan	Variabel Independen : Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Dan Peran Internal Audit Sektor Penelitian : Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Bandung	Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, Dan Peran Internal Audit Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
20.	Rukmi Juwita (2013)	Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Variabel Independen : Sistem Informasi Akuntansi Variabel Dependen : Kualitas Laporan Keuangan	Variabel Independen : Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Sektor Penelitian : Dilakukan Pada Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
21.	Safrida Yuliani, Nadirsyah, Usman Bakar (2010)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit	Variabel Independen : Sistem Informasi Akuntansi Variabel Dependen : Kualitas Laporan Keuangan	Variabel Independen : Pemahaman Akuntansi, Dan Peran Internal Audit Sektor Penelitian : Studi Pada Pemerintah	Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Secara Simultan Berpengaruh

		Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Banda Aceh)		Kota Banda Aceh	Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh
--	--	--	--	-----------------	---

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka penelitian merupakan alur yang menggambarkan proses berpikir yang dituangkan dalam bentuk hubungan antar variabel yang diteliti dan cara pengukurannya serta hasil penelitian yang diharapkan. Tujuan utama dari kerangka penelitian adalah memberikan arah dan fokus penelitian secara efektif yang didasarkan pada hasil kajian teoritik dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Manfaat utama dari kerangka penelitian yang jelas adalah peneliti dapat dengan jelas membangun hipotesis-hipotesis penelitian yang akan diuji.

2.2.1 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Seperti yang di ungkapkan Romney & Steinbart (2012:10) “Sistem informasi Akuntansi memiliki kontribusi yang kuat terhadap Kualitas Laporan Keuangan, terutama dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang dihasilkan.”

Adapun tujuan utama dari sistem informasi akuntansi menurut Susanto (2017:37) adalah sebagai berikut:

Tujuan utama sistem informasi akuntansi adalah untuk meningkatkan kualitas informasi (laporan keuangan), yaitu informasi yang tepat guna (*relevance*), lengkap dan terpercaya (akurat). Dengan kata lain sistem informasi akuntansi harus dengan cepat dan tepat mampu memberikan informasi yang diperlukan.

Definisi sistem informasi akuntansi menurut Susanto (2017:72) dapat didefinisikan kumpulan atau group dari sub sistem / komponen / bagian apapun baik fisik / non fisik yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan bekerja sama secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan. Menurut Krismiaji (2010:4) sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis.

Peneliti Sebelumnya yang dilakukan Ismail dan Agustina (2016) menyatakan, penggunaan sistem akuntansi manajemen terbatas hanya pada informasi keuangan internal yang berorientasi historis. Namun, saat ini meningkatnya peran sistem akuntansi manajemen untuk membantu peran manajer dalam perencanaan, pengarahan, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan telah mengakibatkan perubahan pada sistem akuntansi manajemen.

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Silviana (2014) menyatakan bahwa, Penerapan SIA memberikan kontribusi terhadap kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah, hal ini disebabkan sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang terintegrasi dalam menghasilkan laporan keuangan.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Putu , Made , Sujana (2014) menyatakan bahwa, dengan adanya pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan pada pemerintah daerah, maka akan dapat meningkatkan kinerja serta menghasilkan suatu hasil yang baik pula, yakni berupa laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Juwita (2013) menunjukkan bahwa, sistem informasi akuntansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini juga memberikan bukti empiris bahwa sistem informasi akuntansi pemerintahan yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya dan juga dari teori penghubung yang ada, maka atas dasar pemahaman penulis penerapan sistem informasi akuntansi dapat di jelaskan bahwa dengan sistem informasi akuntansi yang baik menunjukkan pengolahan data yang baik sehingga kemungkinan kesalahan pengolahan data sangat minim, dengan demikian SIA yang baik akan menghasilkan output berupa laporan keuangan yang baik pula, demikian juga dengan terdokumentasinya prosedur yang baik akan merekam seluruh transaksi dan prosedur dengan tepat, sehingga laporan keuangan yang disajikan berisi informasi yang sangat lengkap dan laporan keuangan yang dihasilkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para pengambil keputusan. Menurut penelitian

Ismail dan Agustina (2016), Silviana (2014), Putu, Made, Sujana (2014), Juwita (2013), Sistem Informasi Akuntansi memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2.2.2 Pengaruh Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dengan Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah menurut Mahmudi (2016:27) sebagai berikut:

“Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi didalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern pemerintah yang dimiliki pemerintah daerah”.

Menurut Sukmaningrum (2011:38) pengaruh antara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu :

”Sistem pengendalian intern pemerintah meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas”.

Rai (2011:283) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah merupakan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan

keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarannya, memandu entitas berjalan bagaimana semestinya. Salah satu tujuan umum manajemen dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif adalah agar pelaporan keuangan *reliabel* (Arens, 2008:370).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chodijah, Dan Hidayah (2018) menyatakan bahwa pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian intern pemerintah meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi pemerintah.

Dari penelitian sebelumnya juga yang dilakukan oleh Armel (2017) menyatakan bahwa pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pengendalian internal pemerintah maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik.

Selain itu husna (2017) juga menyatakan bahwa pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, yaitu dengan masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan. Hasil audit yang dilakukan oleh BPK, BPK memberikan opini “tidak wajar dan/atau *disclaimer*” diantaranya

disebabkan oleh kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah yang dimiliki oleh pemerintah daerah terkait.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Harnoni (2016) mengatakan bahwa sistem pengendalian pemerintah sangat dibutuhkan tidak hanya untuk pengendalian dalam akuntansi keuangan, namun juga agar memberikan jaminan dilaksanakannya strategi yang direncanakan pada instansi secara efektif dan efisien agar tercapainya laporan keuangan yang baik. Selain itu, dengan adanya sistem pengendalian internal pemerintah yang optimal diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas guna meminimalkan resiko dan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dan penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Luh, Tunga , Darmawan (2014) mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah dikatakan dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan karena dengan diterapkannya sistem pengendalian internal pemerintah maka pemerintah daerah akan memiliki otorisasi pemisahan tugas yang jelas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya dan juga dari teori penghubung yang ada, maka atas dasar pemahaman penulis bahwa penerapan sistem pengendalian internal pemerintah adalah menyajikan data yang dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasional, mendorong pelaksanaan kebijaksanaan yang ada, melindungi harta Pemerintah Daerah, mendorong ditaatinya kebijakan yang telah ditetapkan dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan. Dan dengan adanya pengendalian internal berupa kebijakan –

kebijakan yang ditetapkan akan mengurangi tingkat kecurangan yang terjadi pada suatu entitas maka dengan demikian laporan keuangan yang dihasilkan akan terbebas dari penyelewengan. Menurut penelitian Chodijah , Dan Hidayah (2018), Armel (2017), Husna (2017), Harnoni (2016), Luh , Atmadja, Darmawan (2014), Sistem Pengendalian Internal pemerintah memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2.2.3 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Intern terhadap Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah menurut Mahmudi (2016:27) sebagai berikut:

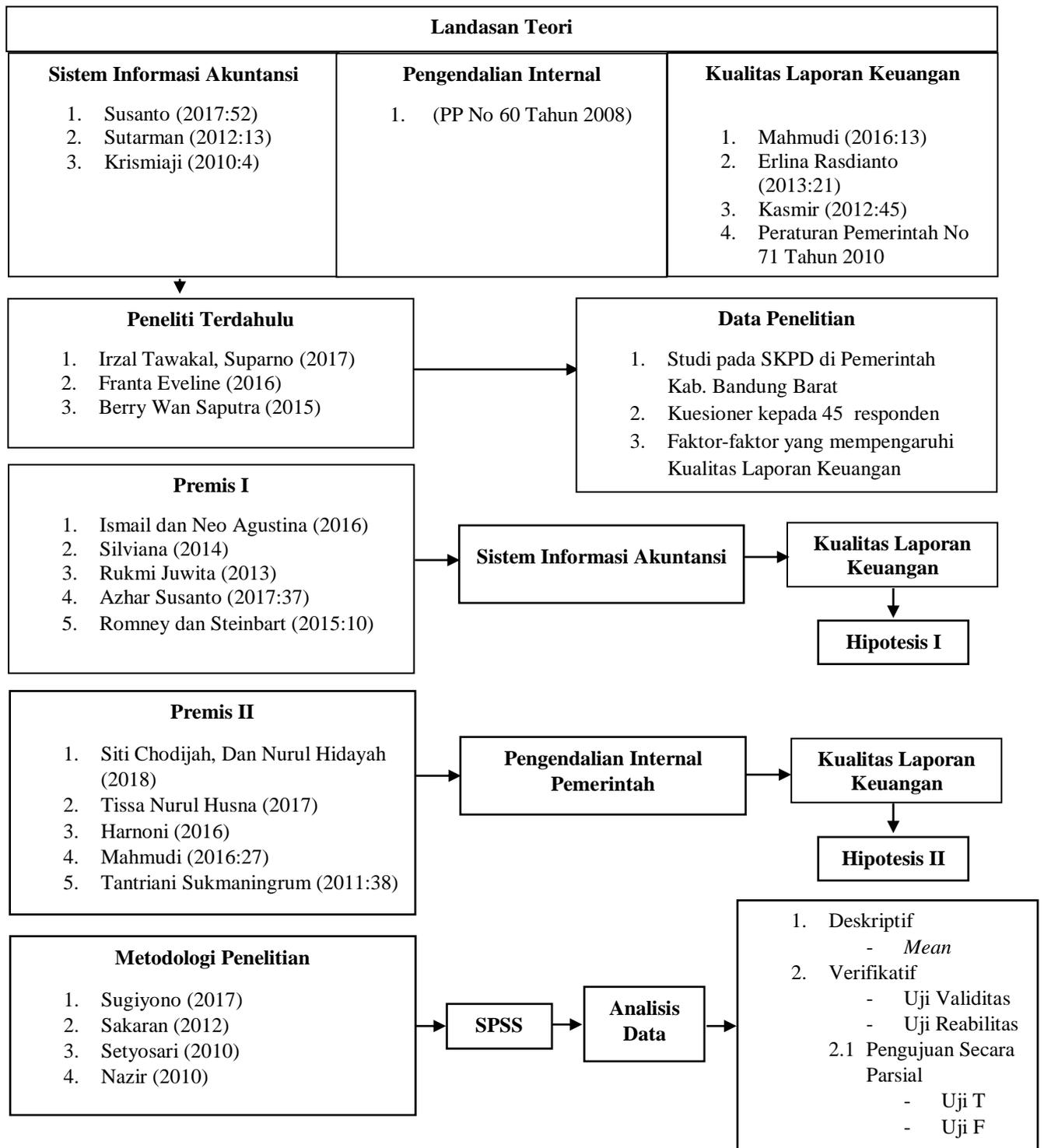
“Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi didalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah”.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Irzal Tawakal, Suparno (2017) mengungkapkan bahwa laporan keuangan dihasilkan dari suatu proses yang didasarkan pada input yang baik, proses yang baik dan output yang baik. Ketiga aspek tersebut haruslah terpadu dan berkesinambungan sebagai pondasi sistem pelaporan keuangan yang baik. Selain itu juga Tawakal, Suparno (2017) juga

mengungkapkan jika Sistem pengendalian internal yang lemah menyebabkan sulitnya mendeteksi kecurangan/ketidakkuratan proses akuntansi sehingga bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten. Dengan demikian maka sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

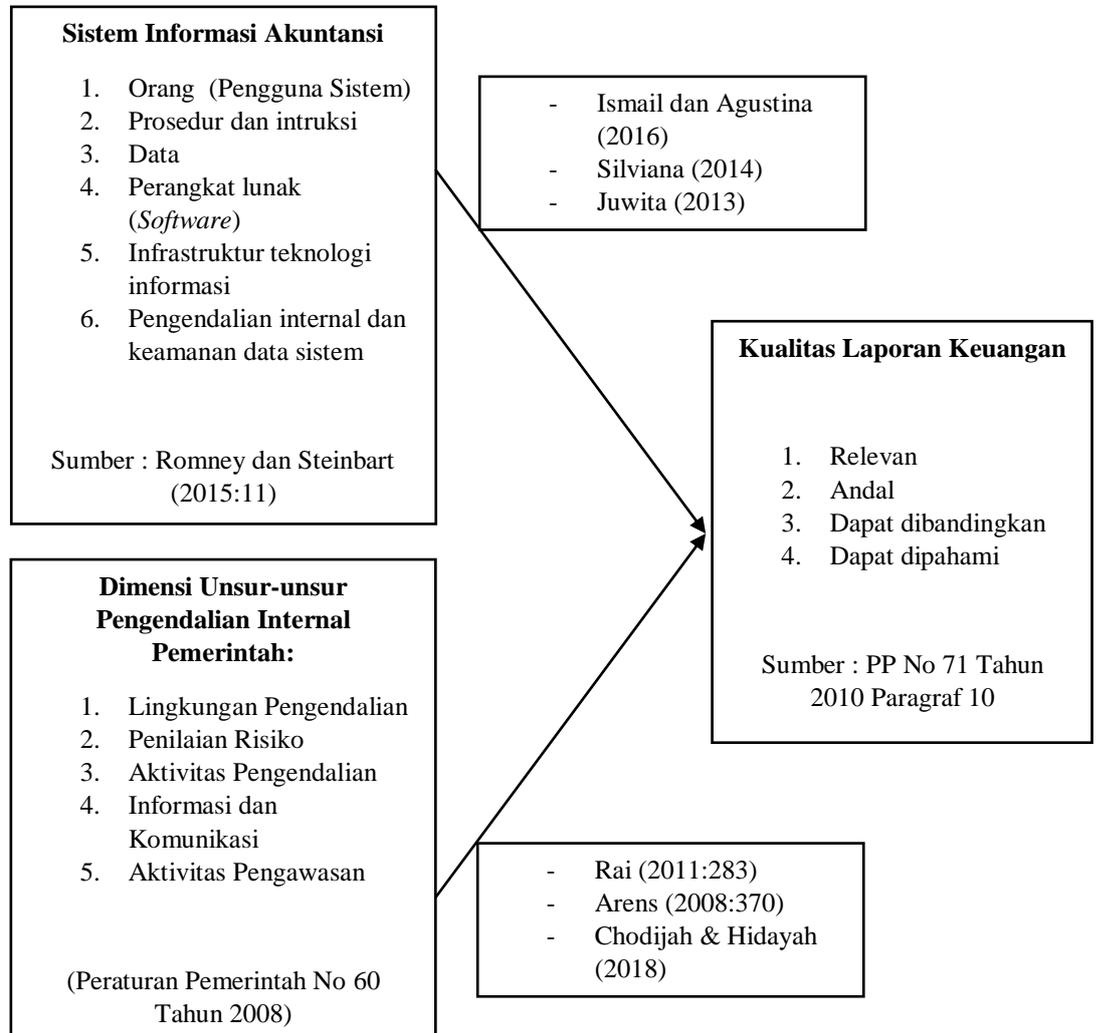
Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya dan juga dari teori penghubung yang ada, maka atas dasar pemahaman penulis bahwa penerapan sistem informasi akuntansi dan ditunjang dengan adanya pengendalian internal yang baik akan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan, yaitu dengan adanya sistem pencatatan, pengukuran, dan pelaporan yang sudah terintegrasi oleh sistem lalu ditunjang dengan adanya pengendalian internal yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan operasional pemerintah daerah akan membuat hasil yaitu berupa laporan keuangan yang memiliki kualitas yang tinggi karena sudah didukung oleh sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal. Menurut Mahmudi (2016:27) dan penelitian Tawakal, Suparno (2017) Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Paradigma Penelitian



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

2.4 Hipotesis Penelitian

Sugiyono (2017:64) berpendapat bahwa yang dimaksud hipotesis adalah sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang *relevan*, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.”

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas telah diuraikan, maka penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H1: Sistem informasi akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
- H2: Pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
- H3: Sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.